



ANALISIS PERAN PAJAK DAERAH DAN PAJAK PUSAT DALAM PENDAPATAN NEGARA: PERSPEKTIF FISKAL DAN EKONOMI

ANALYSIS OF THE ROLE OF REGIONAL TAXES AND CENTRAL TAXES IN STATE REVENUE: FISCAL AND ECONOMIC PERSPECTIVES

Intan Azzahra¹, Khoirotun Nisa²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: intanpohan2603@gmail.com¹, khoirotunisa.080905ok@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-06-2025

Revised : 16-06-2025

Accepted: 18-06-2025

Published : 20-06-2025

Abstract

Taxes serve as a fundamental source of revenue for the state, essential for financing development and providing public services. In Indonesia, taxes are categorized into central and regional types, each fulfilling a critical role in bolstering the nation's financial framework. This article explores the functions of these two categories of taxes from both fiscal and economic viewpoints, emphasizing their contributions, challenges, and strategies for optimization. The findings reveal that central taxes remain the predominant source of national revenue, while regional taxes are crucial for fostering fiscal independence and promoting equitable development across regions. To enhance the effectiveness of fiscal resource mobilization, it is vital to create synergy and harmonization between central and regional tax systems. By optimizing tax collection through digitalization and improving taxpayer compliance, we can strengthen the fiscal capacities of both regional and central governments, thereby facilitating sustainable national development.

Keywords: *Central Tax, Regional Tax, State Revenue*

Abstrak

Pajak adalah sumber penting dari pendapatan pemerintah, yang sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan layanan publik. Di Indonesia, pajak terdiri dari pajak pusat dan lokal, yang masing-masing memainkan peran strategis dalam mempertahankan keuangan negara. Dalam artikel ini, kami menganalisis peran dua pajak dari perspektif keuangan dan ekonomi dengan menyoroti kontribusi, tantangan, dan strategi untuk mengoptimalkan manajemen. Hasil analisis menunjukkan bahwa sementara pajak pusat masih memberikan kontribusi terbesar untuk pendapatan nasional, pajak lokal memainkan peran penting dalam independensi pajak dan mempromosikan pengembangan regional. Sinergi dan keharmonisan antara pajak pusat dan regional diperlukan untuk memobilisasi sumber daya fiskal, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efektivitas pengurangan ketidaksetaraan antar wilayah. Mengoptimalkan penelitian pajak melalui digitalisasi dan peningkatan kepatuhan pembayar pajak juga dapat memperkuat kapasitas pajak regional dan pusat untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kata kunci : *Pajak Pusat, Pajak Daerah, Pendapatan Negara*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah yang sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan layanan publik. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua kategori utama: pajak pusat dan lokal. Kedua jenis pajak memainkan peran strategis dalam mendukung pendapatan nasional dan mendukung pengembangan yang adil di tingkat pusat dan regional. Artikel



ini meneliti peran kedua jenis pajak dari perspektif keuangan dan ekonomi, serta diskusi tentang tantangan dan strategi optimisasi yang dapat meningkatkan kontribusi pajak untuk pendapatan nasional.

Di era desentralisasi dan otonomi lokal, manajemen pajak regional menjadi semakin penting sehingga pemerintah daerah dapat mengendalikan secara mandiri. Namun, peran pajak pusat diatur dengan mendukung anggaran negara. Kesenjangan antara kapasitas pajak regional dan pusat dan tantangan kepatuhan pajak adalah fokus perhatian dalam upaya memperkuat pendapatan negara melalui pajak. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menerapkan analisis komprehensif tentang peran pajak pusat dan regional dan dampak ekonominya pada mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan penelitian sastra dari sumber sekunder seperti laporan pemerintah formal, jurnal ilmiah, dan dokumen pajak. Data dianalisis secara deskriptif untuk menilai peran pajak pusat dan regional dalam pendapatan nasional dari perspektif keuangan dan ekonomi. Analisis fokus pada kontribusi, tantangan dan strategi untuk mengoptimalkan pajak pusat dan regional berdasarkan data dan literatur yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat: Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, pemerintah pusat dikendalikan dan dikelola oleh Biro Umum (DGT). Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPH), nilai tambah (PPN), Barang Mewah (PPNBM) PPN, dan berbagai jenis Pajak Pertanian dan Konstruksi (PBB).

Pajak Regional: Didasarkan pada pemerintah daerah (negara bagian dan wilayah/kota) berdasarkan nomor hukum 1 tahun 2022, dari perspektif hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (HKPD Act). Contohnya termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel, pajak restoran, pajak iklan, dan pengajuan Undang -Undang Pertanian dan Bangunan (BPHTB).

2. Peran Pajak Pusat dalam Pendapatan Negara

Pajak Pusat adalah tulang punggung utama pendapatan nasional dan menyediakan dana untuk pembiayaan berbagai program nasional, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur,



dan masalah sosial. Manajemen terpusat memungkinkan efisiensi dan distribusi yang adil, tetapi dapat menimbulkan tantangan tergantung pada kebutuhan yang adil dari berbagai daerah.

3. Peran Pajak Regional dalam Pembangunan Lokal dan Nasional

Pajak Regional memungkinkan pemerintah daerah untuk mendukung independensi keuangan pajak dan pengembangan dana dan layanan publik sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah Anda. Selain itu, meningkatkan pendapatan pajak lokal akan membantu mengurangi ketergantungan regional pada transfer dana dari pusat dan mengalokasikan anggaran yang lebih fokus untuk prioritas nasional.

4. Perspektif Fiskal dan Ekonomi

Perspektif Fiskal: Pajak, baik dari pusat maupun daerah, berperan sebagai alat utama dalam mobilisasi sumber daya fiskal. Keberhasilan dalam pengelolaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi adalah kunci untuk meningkatkan penerimaan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangatlah penting, agar kebijakan perpajakan yang diterapkan dapat berjalan harmonis tanpa adanya tumpang tindih.

Perspektif Ekonomi: Pajak berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengendalian ekonomi, redistribusi pendapatan, serta penyediaan modal untuk pembangunan. Jika diterapkan secara efektif, pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan membantu mengurangi ketimpangan antar wilayah.

5. Tantangan dan Strategi Optimalisasi

Tantangan: Ditemui adanya ketimpangan kapasitas fiskal yang mencolok antar daerah, tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, keterbatasan dalam teknologi dan sumber daya manusia, serta adanya potensi korupsi.

Strategi: Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi pemutakhiran data perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, harmonisasi kebijakan pajak antara pusat dan daerah, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

6. Harmonisasi kebijakan pajak melibatkan koordinasi regulasi,

penyesuaian sistem manajemen, dan pertukaran data yang efektif. Keberadaan harmoni politik membuat proses audit pajak lebih efisien dan transparan, meningkatkan kepercayaan pembayar pajak dan memaksimalkan potensi pendapatan.



7. Dampak pajak pada pembangunan berkelanjutan

Pajak yang efektif dan adil memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendapatan pajak pusat dan regional menyediakan dana untuk program prioritas yang terkait dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Selain itu, kebijakan pajak dapat mengarahkan mereka untuk mempromosikan investasi yang ramah lingkungan dan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Manajemen yang baik tidak hanya memperkuat keuangan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

8. Peran Teknologi dalam Modernisasi Sistem Perpajakan

Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Digitalisasi sistem perpajakan, termasuk penerapan e-filing, e-billing, dan aplikasi monitoring, berperan signifikan dalam mempercepat proses administrasi, mengurangi kemungkinan kesalahan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, teknologi memungkinkan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga mempermudah proses validasi dan pengawasan yang pada gilirannya dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak.

9. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen krusial dalam keberhasilan mobilisasi pendapatan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melaksanakan program edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang signifikansi pajak bagi pembangunan negara. Pendekatan yang bersifat humanis dan transparan, serta penyediaan layanan perpajakan yang mudah diakses, dapat mendorong wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya. Lebih jauh lagi, penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan harus dilakukan secara konsisten untuk menciptakan efek jera yang diperlukan.

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa pajak pusat terus berkontribusi pada pendapatan utama dalam pendapatan negara. Namun, pajak lokal memainkan peran penting dalam mempromosikan kemandirian finansial regional dan pengembangan yang adil. Mengoptimalkan pendapatan pajak negara membutuhkan sinergis dan harmoni antara pajak pusat dan regional. Optimalisasi pajak lokal dan peningkatan kepatuhan pembayar pajak melalui penggunaan teknologi akan memperkuat kapasitas anggaran regional dan dengan demikian mendukung anggaran pusat dan pembangunan



berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, pajak pusat dan regional bekerja secara sinergis, memperkuat keuangan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S. (2022). Pajak pusat dan pajak daerah, apa perbedaannya? Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/6350cbbcb577d80e800cc8c9/Pajak-Pusat-dan-Pajak-Daerah-Apa-Perbedaannya-->
- Dharmawan, I. (2024). Memahami perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). Kajian fiskal regional tahun 2023: Sinergi pusat-daerah dalam pendapatan negara <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta/id/data-publikasi/berita-terbaru/2871-kfr-tahun-2023-provinsi-dki-jakarta.html>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Optimalisasi pajak daerah dalam mendukung anggaran pemerintah pusat. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3792-optimalisasi-pajak-daerah-dalam-mendukung-anggaran-pemerintah-pusat.html>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022.pdf>
- Universitas Indonesia. (2023). Analisis potensi pajak daerah untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah [Jurnal]. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1284&context=jepi>